

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan media dalam menginformasikan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu bagi pihak – pihak berkepentingan. Informasi keuangan pada periode berjalan sangat erat kaitan dengan informasi laba sebagai tolak ukur perusahaan dalam menilai kinerja keuangan. Penyajian laba sering kali dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan *maneuver* dalam merepresentasikan kinerja perusahaan yang baik (*window dreesing*) dan dasar penting dalam menyusun perencanaan berkaitan dengan aspek kewajiban khususnya perpajakan perusahaan sebagai pertimbangan dalam mengungkap laba pada periode berjalan bertujuan meminimalisir kewajiban pajak perusahaan berdasarkan perencanaan pajak.

Manajemen laba terjadinya berdasarkan keputusan manajemen berdasarkan beberapa pertimbangan berkaitan dengan metode yang digunakan. Dalam melakukan manajemen laba apabila ingin melaporkan laba perusahaan lebih tinggi dibandingkan sesungguhnya, manajer dapat memilih metode akuntansi yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan ketentuan prinsip akuntansi yang berlaku. Komponen-komponen yang seringkali digunakan sebagai objek rekayasa manajerial secara umum diklasifikasikan menjadi aktiva lancar, aktiva tetap, hutang

lancar, dan laba. Dalam komponen aktiva lancar pihak manajerial dapat berpeluang mengakui percepatan pengakuan pendapatan dan penundaan pembebanan biaya pada periode berjalan yang terrefleksi pada saldo laba pada tahun berjalan (Sulistyanto, H.Sri 2008).

Manajemen Laba merupakan sisi lain dari teori agensi yang menekankan pentingnya penyerahan operasionalitas perusahaan dari pemilik (*principals*) kepada pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk mengelola perusahaan dengan lebih baik (*agent*). Konsep manajerial yang mengabungkan hubungan antara pemilik dan pengelolaan ini menyatakan bahwa setiap pihak lain yang mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pengelolaan sebuah perusahaan, setiap pihak harus mempunyai komitmen untuk menghargai dan menghormati hak dan wewenang pihak lain. Setiap pihak tidak diperbolehkan untuk mengintervensi hak dan wewenang pihak lain.

Hubungan agensi antara pemilik dan pengelola perusahaan seharusnya menghasilkan simbiosi mutualisma yang menguntungkan semua pihak, khususnya apabila setiap pihak menjalankan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Namun yang terjadi sebaliknya, muncul permasalahan agensi antara pemilik dan pengelola perusahaan. Permasalahan ini muncul karena ada pihak yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi meskipun merugikan pihak lain. Bahkan dalam perkembangannya permasalahan agensi juga menjadi permasalahan antara pengelola dengan pihak lain yang mempunyai hubungan dengan perusahaan, yaitu calon investor, kreditur,

supplier, regulator, dan *stakeholder* lainnya. Permasalahan yang muncul dari keinginan manajer untuk mengoptimalkan kesejahteraan pribadi dengan mengelabui pemilik dan *stakeholder* lain yang tidak mempunyai akses dan sumber informasi yang memadai. (Sulistyanto, H.Sri 2008). Terdapat dua insentif utama yang mendorong perusahaan melakukan manajemen laba, yaitu menghindari penurunan laba dan kerugian. Informasi laba yang merupakan bagian dari laporan keuangan sering menjadi target rekayasa manajemen untuk memaksimalkan kepentingan tertentu dan nilai perusahaan dalam pasar modal, namun hal tersebut dapat merugikan pemegang saham atau investor (Watts dan Zimmerman, 1986).

Tindakan oportunistik tersebut dilakukan dengan cara melakukan memilih kebijakan akuntansi tertentu, sehingga dapat mempengaruhi jumlah laba yang ditampilkan dalam laporan keuangan. Perilaku manajemen untuk mengatur laba sesuai dengan keinginannya (P, Vince dan Kamaliah, 2014). Dalam merefleksikan distribusi laba perusahaan sangat kaitannya dengan aspek perpajakan terutama terkait perbedaan dasar pengakuan yang bersinggungan langsung dengan aspek perpajakan dalam penyusunan laporan fiskal dan terjadinya pengakuan beban pajak tangguhan dan aktiva pajak tangguhan. Hal tersebut terjadi karena perbedaan pengakuan menurut akuntansi dan peraturan perpajakan, seperti perbedaan masa manfaat aset tetap, natura dan lainnya yang membuat terjadinya perbedaan beda tetap dan beda waktu yang memunculkan terjadinya aktiva tangguhan dan beban pajak tangguhan yang akan dikalkulasikan dengan terutang pajak pada

periode mendatang. Dalam mengukur keleluasaan pihak manajemen, beban pajak tangguhan lebih baik dibandingkan akrua, sebab peraturan akuntansi memberikan lebih banyak keleluasaan bagi manajer dibandingkan dengan peraturan pajak (Philips dkk, 2003).

Keleluasaan manajemen dalam melakukan manajemen laba terjadi karena asimetri informasi dibandingkan pemangku kepentingan lainnya seperti investor, kreditor, dan pemerintah. pihak manajemen memiliki kecukupan informasi menyajikan kinerja laporan yang baik. Pihak manajemen cenderung memaksimalkan berbagai upaya hingga rekayasa transaksi untuk memperlihatkan kinerja yang baik bagi perusahaan. Hal tersebut selain untuk mempertahankan saldo laba positif perusahaan juga bertujuan untuk menggambarkan kondisi perusahaan yang baik kepada pihak eksternal khususnya calon investor, sehingga meningkatkan nilai harga saham pada pasar modal.

Salah satu cara perusahaan melakukan manajemen laba seperti kasus yang penulis kutip dari Bisnis.tempo.co, dugaan mark up laba bersih yang dilakukan PT Kimia Farma Tbk pada tahun 2001 dalam laporan keuangan saldo laba pada posisi Rp. 131 Miliar sedangkan sebenarnya saldo laba pada tahun tersebut hanya Rp. 99 Miliar, selain itu kasus lain yang penulis kutip dari Tribunnews.Com, terkait kasus rekayasa perdagangan PT Mobile 8 Telecom pada tahun 2009 dengan salah satu distributor yaitu PT Djaya Nusantara Komunikasi dalam bentuk produk telekomunikasi sebesar Rp. 80 Miliar. Transaksi fiktif itu bertujuan untuk menampilkan kinerja perusahaan

seolah-olah adanya transaksi perdagangan dalam jumlah besar didukung dengan faktur fiktif dan mutasi uang ke rekening distributor tersebut bertujuan untuk merepresentasikan saldo laba yang baik pada praktek manajemen laba.

Salah satu faktor terjadinya manajemen laba yaitu perencanaan pajak merupakan tahapan perusahaan dalam memperhitungkan beban pajak kini secara efisien sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan. Peluang bagi wajib pajak terbuka melalui kemudahan dari *self-assessment system* atau kesadaran wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak cenderung mendapatkan kesempatan lebih untuk melakukan penghindaran pengakuan penghasilan hingga aset untuk memperhitungkan kewajiban pajak seminim mungkin dan peluang besar dalam melakukan penggelapan pajak. Hal tersebut terlihat dari besarnya pengungkapan aset yang diungkapkan dalam program amnesti pajak pada periode II. Berdasarkan data Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan total deklarasi harta pada periode II mencapai 4.296 Triliun Rupiah yang mengindikasikan lemahnya program *self assessment* yang berpeluang besar bagi wajib pajak dalam menutupi penghasilan hingga aset pada Surat Pemberitahuan (SPT).

Sejak 1984 Indonesia menganut *self-assessment system* yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Keberhasilan *self-assessment system* sangat bergantung pada kesadaran dan peran serta masyarakat (*voluntary compliance*), namun peranan program tersebut

berbanding terbalik dengan tujuan pemerintah dalam mewujudkan tingat kesadaran wajib pajak. Salah satu sektor yang memiliki banyak kasus pajak namun tidak banyak terselesaikan yaitu sektor *Hotel, restaurant* dan *Tourism*. Seperti kasus yang terjadi yang peneliti ambil dari media bali.bisnis.com terkait kasus dugaan korupsi pajak hotel *Ocean Blue* di kuta bali. Menurut Kejaksaan Negeri Denpasar Bali, kasus tersebut dihentikan karena minimnya alat bukti dan ditaksir pemilik hotel tidak melakukan pembayaran pajak hingga mencapai 10 miliar rupiah. Hal tersebut terlihat pajak hotel dan restoran masih belum tergali secara penuh dalam penegakan hukum yang berpotensi sebagai sumber penerimaan pajak yang sangat mempengaruhi pendapatan asli daerah dalam meningkatkan pembangunan.

Rendahnya penegakan hukum di Indonesia membuat berbagai perusahaan memanfaatkan peluang dalam berbagai upaya. Salah satunya pada kasus yang diberitakan nasional.kompas.com terkait kasus penghindaran bentuk usaha tetap yang dilakukan *google.inc* sehingga menjadi dasar dalam menghindari kewajiban pajak di Indonesia dengan alasan aktivitas bisnis tidak berjalan secara faktual melainkan *online*. Penghindaran tersebut dapat mengindikasi *google.inc* dalam melakukan manajemen laba yang bertujuan menghindari kewajiban pajak dengan memanfaatkan kelemahan undang – undang perpajakan di Indonesia terkait pendapatan yang tidak faktual sebagai dasar tidak mengakui adanya transaksi sehingga mengklaim tidak diwajibkan dalam membuat Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Semakin perusahaan melakukan perencanaan pajak akan mengindikasikan

perusahaan melakukan praktek manajemen laba dalam melakukan pengelolaan keuangannya dengan memperkecil laba kena pajak, sehingga perusahaan dapat menekan jumlah pajak yang dibayarkan, (Dewa dan Made 2016).

Untuk menarik pada minat investor perusahaan memiliki berbagai cara dalam merkayasa terjadinya transaksi pada komponen aktiva tetap perusahaan dapat berpeluang melakukan manajemen laba dengan menentukan metode pengukuran model biaya atau model revaluasi sampai dengan metode depresiasi terkait estimasi nilai umur ekonomis dalam menentukan depresiasi setiap tahunnya. Komponen hutang lancar seringkali menjadi objek rekayasa manajerial seperti penundaan pendapatan yang terklasifikasi pada hutang jangka pendek atau penundaan pengakuan biaya agar mengoptimalkan kondisi keuangan yang baik dan hal tersebut akan terrefleksi dalam saldo laba tahun berjalan.

Faktor yang mendukung terjadinya praktik manajemen laba yaitu dengan pengakuan secara akrual dalam beberapa transaksi hingga mendorong manajemen melakukan kecurangan dalam pengakuan secara akrual dalam mempertahankan laba dan kinerja yang baik bagi pihak eksternal khususnya investor. Perusahaan memiliki kelengkapan informasi yang baik dalam memprediksikan kondisi keuangan tahun berjalan hingga tahun berikutnya melalui perencanaan – perencanaan kegiatan perusahaan yang ditargetkan sehingga perusahaan pada sewaktu-waktu dapat memiliki pilihan dalam

melakukan manajemen laba dalam mempertahankan kecenderungan laba dengan mengoptimalkan penerapan akrual secara wajar.

Rekayasa yang sering terjadi dalam mempertahankan laba dengan mempercepat pengakuan pendapatan serta penerbitan faktur dan dokumen lainnya sebagai dasar untuk mengakui pendapatan secara wajar atau memanfaatkan kelemahan informasi pihak eksternal dalam menunda pendapatan melalui penundaan penerbitan faktur dan disesuaikan berdasarkan dokumen transaksi untuk mengoptimalkan saldo laba ditahun berikutnya. Hal lain yang dapat perusahaan lakukan dengan menunda pengakuan beban secara akrual untuk mencegah kondisi kinerja perusahaan mengalami penurunan laba dengan mengakui pengeluaran operasional sementara pada aset lancar untuk merefleksikan laba perusahaan tetap pada kondisi baik. Pihak manajemen bertujuan untuk menghindari kerugian dengan melakukan manajemen laba melalui akrual (Yulianti, 2004).

Untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan Indonesia mulai mengadopsi ketentuan dari *International Financial Reporting Standard* (IFRS) ke dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada tahun 2012 lalu. Konvergensi terhadap IFRS telah dilakukan oleh ratusan negara di dunia dan memberikan manfaat terhadap keterbandingan laporan dan peningkatan transparansi. Melalui Konvergensi tersebut laporan keuangan perusahaan indonesia akan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan dari negara lain. Program konvergensi juga bermanfaat untuk mengurangi biaya modal (*cost of capital*), meningkatkan investasi global dan

mengurangi beban penyusunan laporan keuangan. Salah satunya standar akuntansi yang terkait dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 2013) mengenai penyajian laporan dan penyajian pendapatan komprehensif lainnya.

Pendapatan komprehensif lainnya merupakan salah satu keterbukaan informasi dalam laporan keuangan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, namun disisi lain merupakan peluang terjadinya perbedaan asimetri informasi dan kepentingan antara manajemen dengan pemangku kepentingan. Penyajian pendapatan komprehensif lainnya merupakan keputusan manajemen dalam melakukan pengungkapan pendapatan dan terbuka peluang bagi pihak manajemen untuk menampilkan kondisi keuangan yang baik dari pos - pos pendapatan komprehensif lainnya dalam meningkatkan laba komprehensif perusahaan untuk menutupi kondisi kerugian dari aktivitas utama bisnis, seperti pengakuan peningkatan nilai terkait revaluasi aset yang dapat meningkatkan total aset perusahaan sehingga menggambarkan rasio *return on assets* yang baik bagi calon investor, namun jika revaluasi mengalami penurunan, perusahaan memiliki peluang untuk memilih tidak melakukan revaluasi aset untuk tidak menampilkan penurunan aset yang akan berdampak langsung pada penurunan laba komprehensif perusahaan.

Sektor *Hotel, Restaurant* dan *tourism* merupakan salah satu pilar ekonomi Negara yang memiliki kecenderungan yang semakin baik dan sangat penting dalam meningkatkan pendapatan devisa Negara. Menurut data

Kementrian Pariwisata pada tahun 2015 sektor pariwisata memiliki peringkat empat dari sebelas barang ekspor dan kecenderungan peningkatan penerimaan yang cukup baik. Pada tahun 2015 penerimaan sector pariwisata tercatat sebesar 12.225.89 Juta USD, meningkat 9,5% dari tahun sebelumnya. perkembangan sektor *hotel, restaurant* dan *tourism* memiliki peluang yang baik bagi calon investor dalam melihat peluang investasi di Indonesia yang memotivasi pihak manajemen dalam menampilkan kondisi keuangan yang baik untuk menarik minat investor dengan melakukan manajemen laba.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Pengaruh Perencanaan Pajak, Akrua, dan Pendapatan Komprehensif lainnya terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan *Restaurant, Hotel & Tourism* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Manajemen laba berpotensi terjadinya rekayasa transaksi untuk menghindari penurunan laba hingga kerugian perusahaan
2. Manajemen laba memiliki kecenderungan perusahaan melakukan perencanaan pajak dalam upaya kecurangan dalam pengakuan penghasilan untuk mengoptimalkan beban pajak sehingga mempertahankan saldo laba
3. Penerapan akrual mendukung terjadinya manajemen laba dalam mempertahankan saldo laba positif

4. Penyajian pendapatan komprehensif lainnya dalam meningkatkan transparansi, namun perusahaan memiliki peluang dalam menuntukan terjadinya pengakuan dalam menggambarkan kondisi keuangan yang baik dalam melakukan manajemen laba
5. Manajemen laba bertujuan meningkatkan nilai perusahaan pada pasar modal
6. Kepentingan kepemilikan manajerial mengintervensi terjadinya manajemen laba
7. Pengakuan beban pajak tangguhan dan aktiva tangguhan mendukung perusahaan melakukan manajemen laba
8. Asimetri informasi menguntungkan pihak manajemen dalam melakukan manajemen laba

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan banyaknya faktor yang mempengaruhi Manajemen Laba, Maka peneliti membatasi masalah hanya pada pengaruh perencanaan pajak, akrual, dan pendapatan komprehensif lainnya.

1. Penelitian ini dilakukan Pada Perusahaan *Restaurant, Hotel & Tourism* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2016.
2. Variabel independen yang diuji adalah perencanaan pajak, akrual, dan pendapatan komprehensif lainnya. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba

D. Perumusan Masalah

1. Apakah Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan *Restaurant, Hotel & Tourism* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah AkruaI berpengaruh terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan *Restaurant, Hotel & Tourism* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah Pendapatan Komprehensif lainnya berpengaruh terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan *Restaurant, Hotel & Tourism* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pemahaman mengenai *perencanaan pajak, akrual* dan *pendapatan komprehensif lainnya terhadap Manajemen laba* sebagai referensi untuk penelitian lain atau bagi kalangan akademis untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi pada pihak eksternal khususnya pihak pemilik, kreditor, pemerintah, serta calon investor dalam memberikan gambaran secara luas terkait pembahasan penelitian ini dan bisa menjadi referensi pemecahan masalah yang dikaji secara akademis.